

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implementasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

Albert Venn. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, (Bandung: Nusa Media, 2007).

Bachtiar, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian Undang-Undang terhadap UUD*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015).

Bambang Sutyoso, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).

Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).

Benny K. Harman, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UUD*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013),

C. F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, terjemahan SPA Teamwork, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004).

Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusional*, (Yogyakarta: Total Media, 2009).

Dahlan Thaib, *et. al., Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 1999).

Fajar Laksono Suroso, *Potret Relasi Mahkamah Konstitusi-Legislator Konfrontatif atau Kooperatif*, (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018).

Gustav Radbruch yang diterjemakan oleh Sidarta, *Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

H. Ishaq, *Metode Penulisan Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

H. Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russel & Russel, 1973).

Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2013).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2017).

Irfan Nur Rachman, *Politik Hukum Yudisial Sumber Pembangunan Hukum Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).

Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hal. 299-321.

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Komstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Komstitusi, 2019).

Laporan Tahunan MK 2018, *Mengawal Daulat Rakyat*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2018).

Laporan Tahunan MK 2020, *Meneguhkan Supremasi Konstitusi di Masa Pandemi*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK RI, 2020).

Martitah, *Sistem Pengujian Konstitusional, (Constitutional Review)*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2015).

Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

Maruarar Siahaan, *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2008).

Marwan Efendi, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilah-Pilah Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999).

Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Moh Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007).

Muhammad Reza Winata, *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang: Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).

Muhammad Taher Asari, *Negara Hukum suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Islam, Implementasinya pada Periode Negara dan Masa Kini*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: Rafika Aditama, 2009).

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Ni'matul Huda, *Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2018).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UGM University Press, 1993).

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Piatur Pangaribuan dan Arie Purnomosidi, *Negara Hukum Pancasila dalam Kerangka NKRI*, (Surakarta: Ckrawala Media, 2012).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: UII Press 2003).

Satjipto Raharjo, *Negara Hukum yang Menyenangkan Rakyatnya*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008).

Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim, *Reformasi Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

Taufiqurrohmah Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: Kanisius, 1982).

Tim Penyusun Naskah Komprehensif UUD 1945, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Edisi Revisi Buku Ke VI Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, 2010).

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan Kedua Puluh Empat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).

W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Universitas Adma Jaya Yogyakarta, 2005).

Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

#### **Jurnal dan Artikel:**

Ahmad Syahrizal, *Problem Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Volume 4, Nomor 1, Maret 2017.

Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Muda: dalam Prespektif Politik dan Hukum*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Arief Hidayat sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hal. 33.

Mahela Soemarsono, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3 No. 2 April-Juni 2007.

Maruarar Siahaan, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*, Jurnal Hukum Nomor 3, Volume, 16 Juli 2009.

Maruarar Siahaan, *Uji Konstitusionalitas Peraturan Perundang-undangan Negara Kita: Masalah dan Tantangan*, Jurnal Konstitusi, Vol 7, No. 4, Agustus 2010.

Mohammad Agus Maulidi, *Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017.

Tri Sulistyowati, M. Imam Naser, dan Ali Ridho, *Constitutional Compliance atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jederal Mahkamah Konstitusi, 2019).

**Disertasi:**

Maruarar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang Studi Tentang Mekanisme Checks And Balances di Indonesia*, Desertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 Nomor 157, TLN Nomor 5076.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi*, UU Nomor 24 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 98, TLN Nomor 4316.

Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019*, LN Nomor 186 Tahun 2019, TLN Nomor 6401.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Keputusan MPR tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undang*, Ketetapan No. III/MPR/2000 bertanggal 18 Agustus, 2000.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, PKPU Nomor 6 Tahun 2008.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang *Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*, tertanggal 19 Januari 2018.

**Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung:**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Putusan Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Air, tertanggal 19 Juli 2005.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 10/PUU-VI/2008 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, tertanggal 1 Juli 2008.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 61/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tertanggal 11 Januari 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 17 tentang Pemilihan Umum tertanggal 11 Januari 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 93/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, tertanggal 20 Maret 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, tertanggal 23 Mei 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 10/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 20 Tahun 13 tentang Pendidikan Kedokteran tertanggal 26 April 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 63/PUU/XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, tertanggal 26 April 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPRD, tertanggal 28 Juni 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 1/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, tertanggal 23 Juli 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 31/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 23 Juli 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 38/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 23 Juli 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MA Nomor 30/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 23 Juli 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang bertanggal 22 November 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tertanggal 13 Desember 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 22/PUU-XVI/2017 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bertanggal 13 Desember 2018.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tertanggal 28 Maret 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tertanggal 25 April 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 30 September 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 56/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, tertanggal 11 Desember 2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tertanggal 6 Januari 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang pengujian Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, tertanggal 29 Januari 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, bertanggal 28 September 2020.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA Nomor 46 P/HUM/2018 tentang Uji Materi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, tertanggal 13 September 2018.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan MA Nomor 44 P/HUM/2019 tentang Uji Materiil Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tertanggal 3 Juli 2020.



**Internet:**

*<http://kbbi.web/preskripsi>, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.*

Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,  
*<https://www.mkri.id/index.php?page=web.PUU&menu=4>. Diakses pada tanggal  
12 November 2021.*

